

sosial) telah mengalami perubahan karena adanya konvergensi sosial. Terjadi mobilitas sosial dari wong cilik ke atas, dan sebaliknya priyayi ke bawah. Sementara itu golongan Santri dan Abangan sudah membuka diri sehingga terjadi proses saling mengisi. Akibatnya, batas-batas kultural diantara mereka sulit dikenali lagi.

Sungguhpun demikian secara sosiologis, kehidupan keagamaan, setiap pemeluk agama memiliki perangkat aturan dan pola perilaku sebagai pengatur tata hubungan komunitas kelompok tersebut.³⁹ Untuk pemeluk agama Islam aturan nilainya bersumber pada Al Qur'an, Sunnah Rosulullah, atau sistem nilai lainnya yang diadaptasi tetapi tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Pendidikan Politik Profetik

Setidaknya ada tiga tujuan pendidikan politik/*tarbiyah siyasiyah*, yang meliputi: kepribadian politik/*political self/dzat siyasiyah*, kesadaran politik/*political mobilitation/wa'yu siyasi*, dan partisipasi politik/*political partisipation/musyarakah siyasiyah*.⁴⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepribadian siasah adalah sejumlah atensi individu atau warga terhadap dunia siasah. Kepribadian siasah ini mencakup dimensi informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia siasah, sudut pandang (*viewpoint*), baik yang positif, negatif, ataupun netral, termasuk di dalamnya kematangan psikologis yang menjadi modal seseorang untuk susah berkomunikasi. Kesadaran siasah merupakan refleksi dari pandangan yang menyeluruh terhadap fenomena dan gerak siasah. Di dalamnya terkandung pengetahuan, informasi, nilai-nilai, dan orientasi siasah yang membentuk kesadaran individu terhadap masyarakat dan problematika yang ada di dalamnya. *Musyarakah siyasiyah* atau partisipasi politik (*political partisipation*) merupakan proses yang dilakukan oleh warga untuk berperan di kehidupan siasah dalam masyarakatnya, sehingga ia memiliki peluang untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan dan tujuan siasah bersama.

Menurut Sayyid Salamah Al-Khamisi sebagaimana dipaparkan oleh Utsman Abdul Mu'iz Ruslan (2000: 47), "Kesadaran politik berarti pandangan yang integral

³⁹ Jakson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1986.

⁴⁰ Abu Ridho, *Ibid.* 2002. h. 55-57.

terhadap segala yang dicakup oleh politik, berupa pengetahuan perpolitikan dengan segala tingkatannya yang memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai persoalan politik di tengah masyarakatnya, menganalisisnya, menempatkan posisi diri darinya, serta mendorong diri untuk bergerak demi perubahan atau perkembangannya. Partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independen, atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri, dan sebagainya. Kepribadian politik adalah sekumpulan orientasi politik yang didapatkan oleh individu melalui proses sosialisasi politik. Ini mencakup tiga dimensi:

1. nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dasar yang memiliki makna politis.
2. orientasi, sensitivitas, dan loyalitas yang memiliki tujuan politis.
3. pengetahuan, informasi, dan konsepsi politik”.

Muatan-muatan utama yang senantiasa menjadi fokus *tarbiyah siyasiyah*, meliputi tiga hal, yaitu:

- a) Menyangkut masalah prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang dapat membentuk wawasan siasah, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya tentang ideologi dan doktrin-doktrin siasah,
- b) Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, misalnya tumbuhnya kepribadian, kesadaran, dan partisipasi siasah,
- c) Menyangkut sarana, lembaga, dan metode yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.(Abu Ridha, 2002: 43).

Model Pendidikan Politik Islam

Pendidikan Politik Islam atau *Tarbiyah Siyasiyah Islamiyah* menurut Ikhwanul Muslimin sebagaimana dikutip oleh Abu Ridha (2002: 46) adalah “rangkaiannya upaya sistematis dan intensional yang dilakukan institusi siasah dan tarbiyah untuk memantapkan kesadaran siyasah dan berjuang dalam memenangkan “*izzu al-islam wa al-muslimin*” (kemuliaan Islam dan umat Islam)”.

Definisi di atas menjelaskan beberapa unsur yang ada dalam setiap proses *tarbiyah siyasiah*, meliputi: kepribadian siyasah, kesadaran siyasah, partisipasi siyasah, lembaga-lembaga siyasah, budaya siyasah, dan individu atau warga negara.

Karakteristik *tarbiyah siyasiah Islamiah* yang paling khas adalah referensinya yang baku, yaitu: wahyu dan seluruh perjalanan sejarah Nabi Muhammad saw yang menurut Sayyid Qutb melalui empat tahap, yaitu: membentuk jama'ah, berhijrah ke Madinah, melakukan konsolidasi, tahap perjuangan bersenjata, sementara menurut Imaduddin Khalil, yaitu: penegakkan Islam dalam skop kemanusiaan, penegakkan Islam dalam skop daulah, dan penegakkan Islam dalam skop peradaban (catatan kaki Abu Ridha, 2002).

Tarbiyah Siyasiah Islamiyah dilakukan agar setiap warga mampu, senang, dan aktif berpartisipasi dalam *siasah* terhadap bermacam persoalan masyarakat umum. Keterlibatan warga merupakan wujud dari berbagai bentuk partisipasi yang dapat merealisasikan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan dan urusan umat, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri ataupun luar negeri. Keterlibatan tersebut merupakan refleksi utuh sebagaimana dikatakan Rosululloh saw: “Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka tidaklah ia dari golongan mereka”

Dengan demikian *tarbiyah siyasiah Islamiah* dapat berfungsi memberikan penerangan kepada warga negara terhadap berbagai persoalan nasional, regional, dan internasional, khususnya yang berkaitan dengan sikap politik (*mawqif siyasi*) kaum muslimin. Selain itu *tarbiyah siyasiah Islamiah* juga berupaya menanamkan kesadaran teologis tentang pentingnya *jihad fi sabilillah*, agar setiap individu muslim mempersenjatai diri untuk mempertahankan Islam, mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara, komitmen kepada kewajibannya, aktif dalam kegiatan siyasah, dan berpartisipasi penuh dalam perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran *tarbiyah siyasiah*, yakni kepribadian *siasah*, kesadaran *siasah*, dan partisipasi *siasah* diperlukan beberapa *uslub* (cara pendekatan), baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Uslub yang bersifat langsung terwujud dalam bentuk popularisasi dan magang dalam bidang *siasah*. Sementara itu, yang tergolong *uslub* tidak langsung, misalnya melalui peniruan dan kegiatan yang bersifat akademik.

Sementara itu, sarana penggunaan *uslub* dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pendidikan politik juga turut melibatkan sarana konvensional maupun non konvensional.

Metode yang biasa digunakan tidak hanya terbatas pada indoktrinasi yang memuat langsung ideologi, dan doktrin *siasah*, tetapi juga mencakup metode tidak langsung, misalnya menggunakan sistem belajar dengan cara menanamkan pemahaman atau meniru, menyebarkan materi *siasah*, menyediakan praktek lapangan dan pelatihan *siasah* sebagai pembekalan pengalaman individu dalam bidang *siasah* yang diharapkan dapat mengembangkan potensi kemampuan *siasahnya*. Adapun karakteristik Model Pendidikan Politik Islam menurut dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Model Pendidikan Politik Islam

ATRIBUT/ CIRI-CIRI DASAR	
Dimensi Tujuan	<p>kesadaran politik diarahkan pada:</p> <p>kesadaran terhadap berbagai situasi politik, persoalan nasional, regional, dan internasional khususnya yang berkaitan dengan sikap politik (<i>mawqif siyasi</i>) kaum muslimin.</p> <p>Kesadaran akan pentingnya <i>jihad fi sabilillah</i>, agar setiap individu muslim mempersenjatai diri untuk mempertahankan Islam, mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara, dan komitmen kepada kewajibannya,</p> <p>kepribadian politik akan terbentuknya mentalitas yang kritis dan mampu melakukan dialog konstruktif bukan tumbuhnya loyalitas individu pada penguasa.</p> <p>partisipasi politik, yakni berpartisipasi aktif dan penuh dalam kehidupan politik masyarakat khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya untuk perubahan ke arah yang lebih baik.</p>
Dimensi Metode	<p>Magang, menirukan, pengajaran politik secara langsung, sarana penerapan dan praktek politik secara nyata yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, lembaga-lembaga formal dan nonformal yang tidak terbatas pada tahapan usia/ masa studi serta kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan proses berkesinambungan sepanjang hayat.</p>
Dimensi Kurikulum	<p>wawasan politik (posisi partai menyuguhkan</p>

Cakupan	informasi siasah, ekonomi, masalah sosial, gagasan, kebijakan, serta ideologi partai) <i>jihad fi sabilillah</i>
---------	--

Sumber: Abu Ridha, 2002.

Ada tiga tahapan interaksi politik gerakan Islam sebagai bagian dari manifestasi pendidikan politik yang dilaksanakan meliputi::

a) Tahap Pertama: Penguasaan Ilmu Politik (*al- 'ilm as-siyasi*)

Penguasaan ilmu politik dibutuhkan untuk menentukan keshalihan langkah-langkah yang diambil saat terdapat dorongan dan respon politik dari dalam maupun dari luar, yang terdiri dari:

- 1) *Muthola'ah siyasiyah* (kritik atas literatur politik), meliputi: kajian bibliotik, bertemu dengan narasumber, pengamatan terhadap dinamika politik lokal, nasional, maupun internasional.
- 2) *Munawaroh siyasiyah* (dialog politik) dengan beragam aliran politik yang ada, peta dan rambu yang jelas, baik untuk lapangan konsepsional maupun operasional.
- 3) *Mutaba'ah siyasiyah* (pelaksanaan evaluasi) terhadap seluruh langkah yang telah diambil, sehingga akan diketahui seluruh ruang lingkup politik telah dipahami dengan baik.

b) Tahap Kedua: Melakukan Aksi Penyadaran (*Tan'iyah As-Siyasiyah*)

Langkah tersebut ditempuh dengan menumbuhkan solidaritas internal para kader, baik yang terjun pada lapangan politik atau mereka yang mendukung dari luar serta diikuti dengan upaya penumbuhan lembaga-lembaga politik internal sebagai wahana *tadribat* (latihan) amal aktivis yang disiapkan terjun dalam kancah politik. Dalam tahap ini diikuti pula dengan upaya melakukan beberapa aksi politik, seperti: penyebaran teori politik Islam, aksi-aksi politik (*al-munawaroh as-siyasi*) dalam skala lokal, propaganda politik (*ad-di'yan as-siyasi*), pembentukan organisasi politik (*at-tandzim as-siyasi*), dan penetrasi politik (*al-ikhtiroq as-siyasi*).

c) Tahap Ketiga: Partisipasi Politik (*al musyarokah as-siyasi*)

Diawali dengan partisipasi sosial (*musyarokah ijtima'iyah*) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan maliyah. Dari hal tersebut diharapkan

akan muncul pribadi-pribadi yang dikenal dan mengakar pada masyarakat, selanjutnya akan terbentuk dukungan masyarakat dan program-program yang membunai serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, maka langkah berikutnya diharapkan akan menjadi mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena Pemilu (*al-intikhobiyah*), memasuki parlemen, maupun pemerintahan.⁴¹

Tarbiyah *islamiyah* yang dilaksanakan oleh gerakan dakwah pada dasarnya diarahkan pula sebagai satu kesatuan upaya *tarbiyah siyasiyah* dalam rangka pembentukan kesadaran politik (*takwinul wa'yu siyasi*) kader tarbiyah. Titik tekannya pada upaya membangun kekuatan kader dari sisi pemikiran/*fikriyah*, kekuatan maknawiyah (ruhiyah), serta kekuatan operasional agar kader memiliki kesadaran terhadap problematika umat, pembentukan umat, dan penegakkan agama Islam. Metode yang diaplikasikan sama halnya dengan metode yang direalisasikan pada tarbiyah islamiyah, yakni: melalui ceramah dan diskusi dengan sarana *liqo' tarbawiyah/halaqoh*.

Sementara itu kurikulum cakupannya pada dasarnya melekat pada kurikulum tarbiyah islamiyah yang bersifat integral dan komprehensif. Dalam rangka pencapaian tujuan di atas menurut analisis peneliti terutama akan bersinggungan dengan pokok materi, yang meliputi: *Ma'rifatul Islam*, *Qadhaya Ad-Da'wah*, *Al-Haq Wa Al-Bathil*, *Takwinul Ummah*, dan *Fiqh Ad-Da'wa*.

Pokok materi *Ma'rifatul Islam* terutama ditekankan pada sub pokok materi *syumuliyatul Islam* (kesempurnaan Islam), *minhajul hayah* (pedoman hidup), *thabi'ah diiniil Islam* (tabiat agama Islam), *Al-Amal Al-Islami* (aktivitas Islami) yang mengandung kisi-kisi materi mengenai jihad atau amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah sebagai penyokong/penguat kesempurnaan minhaj, politik sebagai salah satu unsur pelengkap tatkala menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, agama *daulah* dan ibadah merupakan unsur yang membentuk Insan politik, sekaligus insan ibadah, sebagai salah satu tabiat agama Islam, maupun dakwah dan tarbiyah serta harakah dan jihad sebagai manifestasi dari amal Islami.

Pokok materi *qadhaya ad-da'wah* (problematika dakwah) menyentuh sub pokok materi *ahwaal al muslimin al-yaum* (kondisi umat Islam saat ini), *amraadhu al-umamah fil*

⁴¹ *Handout* materi perkuliahan Sosial Politik Islam I TTs

ad-da'wah (penyakit umat dalam dakwah), dan *qadhiyyah al-ummah* (masalah umat) memuat kisi-kisi materi tentang dakwah sebagai sebagai salah satu kelemahan kaum muslimin yang berakibat pada kondisi kaum muslimin saat ini, penyakit-penyakit umat yang berpangkal pada faktor *infiradiyah* (individual) yang perlu diatasi, ilmu pengetahuan, pembinaan (*tarbiyah*), dan jihad sebagai jalan keluar dari permasalahan umat Islam.

Selanjutnya pokok materi *al-haq wa al-bathil* menitikberatkan pada sub pokok materi *al-istiqaamah* (konsisten) dan *hizbullah* (partai Allah: golongan orang beriman) memuat kisi-kisi materi yang menekankan konsistensi terhadap manhaj Allah (Al-Islam) dan menyebutkan bahwa salah satu akhlak dasar golongan orang beriman adalah berjihad di jalan Allah. Pada pokok materi *takwin al ummah* (pembentukan umat) kurikulum cakupan pendidikan politiknya terutama ditekankan pada sub pokok materi mengenai *takwin al-ummah* (membentuk umat), *al-inqilaab al-Islami* (perubahan islami), *ta'liif quluub* (kesatuan hati), *asbaab at-tafarruq wa'ilaajuhu* (sebab-sebab perpecahan dan solusinya), *al-ukhuwah al-islamiyah* (persaudaraan Islam). Sub pokok materi di atas pada dasarnya menitikberatkan tentang *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai landasan dalam rangka pembentukan umat Islam dan bidang politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perwujudan *inqilab islami*/perubahan total secara islami, serta kesatuan hati dalam rangka *jihad fi sabilillah*.

Sub pokok materi *fiqh ad-da'wah* (fiqh dakwah) meliputi: *fadhaa'il ad-da'wah* (keutamaan berdakwah), *ma'na ad-da'wah* (makna dakwah), *fiqh ad-da'wah* (fiqh dakwah), *asaas amaliyah at-takwiin* (dasar-dasar kegiatan pembinaan), *anashir ad-da'wah* (unsur-unsur dakwah), *khashaa'ish ad-da'wah* (ciri-ciri dakwah), *rabbaniyah ad-da'wah* (dakwah yang bernuansa ketuhanan), *kaifa yatakayyafu bil Islam* (bagaimana cara untuk beradaptasi dengan Islam), *daurusyabaab fi haml ar-risaalah* (peran pemuda dalam memikul tugas risalah), *iqaamatu ad-diin* (penegakkan agama), *muqawwimat an-nahdhah al ummah* (pilar kebangkitan umat). Sub pokok materi di atas pada dasarnya mengandung kisi-kisi materi tentang hakikat dakwah, pengertian dakwah, tahapan dakwah, tujuan dakwah (Ummu Yasmin, 2002: 208-231).⁴²

⁴² Umum Yasmin, Yasmin, Ummu. *Materi Tarbiyah Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*. Solo: Media Insani Press.2002:208-231

Simpulan

Dari pemaparan di atas tentang urgensi hadirnya diskursu alternatif Ilmu-Ilmu Sosial di Asia lebih khusus lagi Indonesia, yang didalamnya memberikan peluang untuk terjadinya proses indigenisasi Ilmu-Ilmu Sosial, Kiranya dapat diberikan penegasan bahwa kehidupan politik di Indonesia pasca reformasi politik tahun 1998, dan lebih khusus lagi para aktivis mahasiswa yang dimasa mendatang akan menjadi penerus perjuangan perlu sekali mendapatkan suatu jenis *pendidikan politik profetik*. Bukan sekedar pendidikan politik konvensional yang sudah terbukti tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan kader umat yang visioner. Bangsa Indonesia sangat merindukan hadirnya suatu gelombang generasi pemimpin bangsa yang visioner profetik, suatu visi kenegaraan, keummatan, kemanusiaan yang dibingkai oleh nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Pendidikan politik memiliki urgensi yang tinggi untuk hadirnya suatu generasi yang memiliki kompetensi agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu ummat (negara). Melalui aktivitas pendidikan politik suatu generasi ummat akan mendapatkan transmisi nilai-nilai, ideologi, sistem politik (yang dicita-ciakan) sebagaimana telah disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua model pendidikan politik yang sekarang dipraktekan telah mampu menghadirkan generasi bangsa yang memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Mempertimbangkan kondisi tersebut kiranya perlu dikembangkan suatu model pendidikan politik yang memberikan kemungkinan untuk lahirnya kader-kader umat-bangsa yang mampu berpartisipasi dalam rangka memberikan solusi pada berbagai persoalan ummat-bangsa, seperti misalnya persoalan moralitas, krisis kepercayaan, konflik horosontal dan vertikal, persoalan korupsi, menurunnya harkat dan martabat bangsa, kedaulatan bangsa.

Ikhtiar dan kerja intelektual sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menghasilkan suatu model pendidikan politik, yang memberikan peluang tersedianya jalan keluar untuk hadirnya suatu model generasi penerus ummat-bangsa yang memiliki sejumlah karakter yang dibutuhkan oleh ummat –bangsa Indonesia. Model pendidikan tersebut secara terminology diberi nama pendidikan politik *profetik*.

Pusisi WS Rendra

A ku bertanya,

tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja-meja kekasaan yang macet,

dan papan tulis-papan tulis,

para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan.....

Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing,

Diktat-diktat hanya boleh memberi metode,

Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan,

Kita mesti keluar ke jalan raya,

Keluar ke desa-desa, Mencatat sendiri semua gejala,

Dan mengheyati persoalan yang nyata.

(WS Rendra, Sajak Sebatang Lisong, 19 – 8 1977).

Daftar Referensi:

- Abdurrahman An Nahlawi, 1403, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama*, Libanon: Dar Al- Fikr Al –Mu’asyir.
- Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik*, Syammil , Jakarta, 2002.
- Alatas, Syed Farid, 2010, *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, Yogyakarta: Mizan
- Al Banna, Hasan, 2000, *Risalah Pergerakan Jilid 2*, Solo: Intermedia.
- Beilharz, Peter, 2003, *Teori-teori Sosial: Observasi kritis terhadap para filosof terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Berger, Peter, L., & Luckman, Thomas, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES
- Bourdieu, Pierre. 1998. *Practical Reason, On The Theory of Action*. California: Stanford University Press
- _____, 1990. *The logic of Practice*. California: Stanford University Press
- Bryman, A., 2004. *Sosial Research Methods*. Edisi kedua. Oxford Uni Press
- Cheung, Martha, 2003, From 'Theory' to 'Discourse': The Making of a Translation Anthology, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 66, No. 3 (2003), pp. 390-401
- Faucault, Michael, 1997, *Seks dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia
- Giddens, Anthony, 2004. *The Constitution of Society – Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati
- Gunawan, Anggun, 2010, *Kematian Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia* [online] tersedia di URL: < <http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/01/kematian-ilmu-ilmu-sosial-di-indonesia/>> diakses pada 13 Maret 2012
- Hadi, Novra, 2008, *Diskursus (wacana) dan Kekuasaan: Sebuah Investigasi Kritis* [online] tersedia di URL < <http://bahas.multiply.com/journal/item/33>> diakses pada 26 April 2012
- Jakson, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Jurdi, Syarifuddin, 2012, *Dekonstruksi Ilmu Sosial Indonesia* [online] tersedia di URL:< <http://makassar.tribunnews.com/2012/01/26/dekonstruksi-ilmu-sosial-indonesia>> diakses pada 1 Maret 2012

- Kuntowijoyo, 2006. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, 1986, *Konvergensi Sosial dan Alternatif Gerakan Kultural*
- Lin, N., 1976. *Foundations of Sosial Research*. New York: McGraw-Hill
- Mata, Anis, 2005, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, Solo: Intermedia.
- Rogers, Rebecca, et al, 2005, Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature, *Review of Educational Research*, Vol. 75, No. 3 (Autumn, 2005), pp. 365-416
- Said, Edward, 2010, *Orientalisme, Menggugat Hegemoni Barat dan Menundukkan Timur Sebagai Subjek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singarimbun, M dan Effendy, S., 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Situngkir, Hokky, Impotensi Kronis Ilmu Sosial di Indonesia [online] tersedia di URL: <<http://bandungfe.net/hs/wp-content/uploads/impo.pdf>> diakses pada 10 Maret 2012
- Sarup, Madan, 1996., *Identity, Culture and The Postmodern World*, Googlebooks [online] tersedia pada URL: <http://books.google.com/books?id=V0-PX0QDCU0C&dq=Identity,+Culture+and+The+Postmodern+World+madan+sarup&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA48,M1> [diakses pada 24 Desember 2008]
- Sofyan Effendi, 1996, *Membangun Martabat Manusia Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, 2000, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Inter Media, Solo
- Yasmin, .2002, Ummu, *Materi Tarbiyah Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*. Solo: Media Insani Press
- Yunus, Firdaus, 2010, *Filsafat Sosial; Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia* [online] tersediadi URL: <http://www.lkas.org/filsafat/detail/33/filsafat_sosial_pribumisasi_ilmu-ilmu_sosial_di_indonesia.html>
- <http://www.taushiyah.com/?p=226> diakses pada 25 April 2012
- <http://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/Sociology/Sesi5.Discourse%20-%20CDA.docx> diakses pada 25 April 2012